



## Relevansi Konsep Pertumbuhan Inklusif Sayid Nawab Haider Naqvi terhadap Strategi Pembangunan Ekonomi Kontemporer di Negara Muslim

Indah Suwarni

Arfarizan

Universitas Ibnu Chaldun

[indah.swr@gmail.com](mailto:indah.swr@gmail.com)

### Abstract

*This study analyzes the relevance of the concept of inclusive growth proposed by Sayid Nawab Haider Naqvi within the context of economic development strategies in Muslim countries. The focus of this research is on how the principles of inclusive growth can be applied to address challenges such as income inequality, dependence on natural resources, and limited access to basic services. A qualitative descriptive method was employed to provide an in-depth understanding of Naqvi's concept in the context of development policies in countries like Indonesia, Pakistan, Egypt, and Bangladesh. Secondary data were collected from Naqvi's works and related literature on economic development strategies in Muslim countries. Thematic analysis was conducted to identify key themes such as income inequality, infrastructure access, and poverty alleviation. The results indicate that Naqvi critiques GDP-based approaches, which often fail to distribute the benefits of growth equitably. He emphasizes the importance of three main pillars: increasing per capita income, reducing inequality, and alleviating poverty. Naqvi also highlights the crucial role of government in implementing redistributive policies, particularly in enhancing investments in infrastructure, education, and healthcare to ensure equitable distribution of economic growth benefits. Industrialization is viewed as a key element in creating productive and sustainable employment opportunities. This study concludes that Naqvi's concept of inclusive growth is highly relevant for Muslim countries in achieving equitable and sustainable economic development.*

**Keywords:** *Inclusive Growth, Sayid Nawab Haider Naqvi, Economic Development Strategies, Muslim Economic Development, Wealth Redistribution, Inclusive Economy*

### Abstrak

*Penelitian ini menganalisis relevansi konsep pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh Sayid Nawab Haider Naqvi dalam konteks strategi pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pertumbuhan inklusif dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ketimpangan pendapatan, ketergantungan pada sumber daya alam, dan terbatasnya akses layanan dasar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan*

*untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai relevansi konsep Naqvi dalam kebijakan pembangunan di negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Bangladesh. Data sekunder dikumpulkan dari karya Naqvi serta literatur terkait strategi pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti ketimpangan pendapatan, akses infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Naqvi mengkritik pendekatan berbasis PDB yang sering gagal mendistribusikan manfaat pertumbuhan secara merata. Ia menekankan pentingnya tiga pilar utama: peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan, dan penurunan kemiskinan. Naqvi juga menyoroti peran penting pemerintah dalam kebijakan redistributif, terutama dalam meningkatkan investasi pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk memastikan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi dipandang sebagai elemen kunci dalam menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pertumbuhan inklusif Naqvi sangat relevan untuk negara-negara Muslim dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.*

**Keyword:** *Pertumbuhan Inklusif, Sayid Nawab Haider Naqvi, Strategi Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi Muslim, Redistribusi Kekayaan dan Ekonomi Inklusif*

---

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan isu sentral di negara-negara Muslim, terutama dalam konteks upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian pertumbuhan yang inklusif. Namun, tantangan besar yang dihadapi negara-negara ini adalah ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Ketidakmerataan distribusi kekayaan menciptakan lapisan elit kecil yang memperoleh sebagian besar manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sementara mayoritas populasi tetap berada dalam kemiskinan. Di Afrika, misalnya, meskipun negara-negara seperti Nigeria dan Kenya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat (Awe et al., 2021, p. 1197), kesenjangan ekonomi, khususnya di daerah perkotaan, masih sangat tinggi (Epo et al., 2023, p. ii113). Ini menandakan bahwa meskipun ada pengurangan tingkat kemiskinan di beberapa negara, ketimpangan sosial tetap menjadi hambatan besar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Bhorat et al., 2016, pp. 3–9).

Selain ketimpangan ekonomi, rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan menjadi kendala serius yang menghalangi banyak negara Muslim dalam mencapai pembangunan inklusif. Di Bangladesh, misalnya, meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengurangan kemiskinan, ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan tetap menjadi tantangan utama. Keterbatasan akses ini menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata (Ahmed, 2021, p. 13). Situasi serupa juga dapat dilihat di banyak negara Afrika seperti Ghana, di mana akses terbatas terhadap pendidikan dasar dan kebijakan yang tidak konsisten menambah beban yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin (Arkorful et al., 2020, p. 189).

Sebagian besar negara-negara Muslim, terutama di kawasan Timur Tengah, sangat bergantung pada sumber daya alam seperti minyak dan gas sebagai sumber utama pendapatan nasional. Ketergantungan yang berlebihan ini seringkali menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global, serta menimbulkan masalah lingkungan yang serius.(Vaghefi et al., 2015, p. 28) Negara-negara ini juga menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan di luar sektor energi, yang membatasi kemampuan mereka dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif.(Woertz, 2021, p. 687) Ketergantungan ini perlu diatasi melalui diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor alternatif yang mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat luas.(Tagliapietra, 2019, p. 100397)

Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan ekonomi inklusif di banyak negara Muslim. Banyak individu dan usaha kecil tidak memiliki akses yang memadai terhadap pinjaman atau produk keuangan lainnya, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks ini, sistem keuangan Islam, dengan fokus pada keadilan sosial dan inklusi keuangan, menawarkan potensi besar untuk memperbaiki akses ke layanan keuangan, serta membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pengembangan layanan keuangan Islam dapat memainkan peran penting dalam memperkuat inklusi ekonomi di negara-negara Muslim.(Mohseni Cheraghlou, 2020, p. 93)

Selain itu, korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk memperburuk ketidakadilan sosial di negara-negara Muslim. Sistem pemerintahan yang tidak transparan seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Alokasi sumber daya yang tidak tepat sasaran serta lemahnya sistem pengawasan publik semakin memperburuk situasi ini. Di beberapa negara, anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah tidak mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata.(Sulaeman & Sukmana, 2023, p. 39)

Konsep pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh Sayid Nawab Haider Naqvi menyediakan kerangka teoretis yang komprehensif dan relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi modern, khususnya di negara-negara Muslim. Naqvi menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan per kapita atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebaliknya, fokus utama harus diletakkan pada distribusi yang adil dari hasil-hasil pertumbuhan, yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat, terutama kelompok marjinal, mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan sosial. Pandangan ini secara tegas berbeda dari model pertumbuhan ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan distribusi kekayaan.(Muslimin & Darwanto, 2021, pp. 141-144)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap relevansi teori pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh Sayid Nawab Haider Naqvi dalam konteks strategi pembangunan ekonomi kontemporer di negara-negara Muslim. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi kontemporer di negara-negara Muslim yang menghadapi berbagai tantangan sosial-ekonomi seperti ketimpangan pendapatan, ketergantungan pada sumber daya alam, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menyoroti relevansi teoretis konsep pertumbuhan inklusif dalam konteks kontemporer, tetapi juga memberikan wawasan praktis mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya dan solusi potensial yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis relevansi konsep pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh Sayid Nawab Haider Naqvi terhadap strategi pembangunan ekonomi kontemporer di negara-negara Muslim. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang sedang diteliti, yaitu bagaimana konsep pertumbuhan inklusif Naqvi diterapkan dan relevan dalam konteks pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim yang menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan marginalisasi sosial. (Moleong, 1989, p. 6)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Sumber data utama adalah berbagai karya Sayid Nawab Haider Naqvi yang menjelaskan gagasan-gagasan tentang pertumbuhan inklusif, serta literatur yang relevan mengenai strategi pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai studi kasus yang menggambarkan penerapan kebijakan pembangunan ekonomi di beberapa negara Muslim, seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Bangladesh. Analisis terhadap data ini dilakukan dengan cara menggali konteks dan relevansi dari gagasan pertumbuhan inklusif Naqvi dalam berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diterapkan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan konsep pertumbuhan inklusif Naqvi dan strategi pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Seperti yang diungkapkan oleh Braun dan Clarke, analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Braun & Clarke, 2006, p. 77) Dalam konteks penelitian ini, analisis tematik dilakukan dengan cara mengelompokkan berbagai temuan ke dalam kategori-kategori yang sesuai, seperti aspek ketimpangan pendapatan, akses terhadap

infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan, yang relevan dengan prinsip pertumbuhan inklusif.

## PEMBAHASAN

### Biografi dan Karya Syed Nawab Haider Naqvi

Syed Nawab Haider Naqvi (11 Juli 1935 – 7 Juli 2024) adalah seorang ekonom dan akademisi Pakistan yang dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan teori ekonomi Islam dan kebijakan pembangunan ekonomi. Naqvi lahir di Meerut, India Britania, dan bermigrasi ke Karachi, Pakistan, pada tahun 1950. (Lestari & Damanuri, 2022, p. 130) Latar belakangnya yang berakar pada pendidikan formal di beberapa universitas terkemuka Amerika Serikat memberinya pijakan kuat untuk mengukir karier sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bidang ekonomi Islam. Naqvi memperoleh gelar master dari Yale University pada tahun 1961 dan menyelesaikan gelar doktor di Princeton University pada tahun 1966. Tidak hanya berhenti di situ, ia melanjutkan karier akademiknya dengan melakukan penelitian pasca-doktoral di Harvard University pada periode 1969-1970. Pengalamannya di institusi-institusi pendidikan prestisius ini memberikan dasar yang kokoh bagi kontribusi intelektualnya di dunia akademik dan kebijakan publik. (Yusuf, 2014, p. 236)

Selama kariernya, Naqvi menjabat sebagai Direktur Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) dari 1979 hingga 1995. Di bawah kepemimpinannya, PIDE berperan signifikan dalam merumuskan kebijakan ekonomi jangka panjang di Pakistan. Lembaga ini terlibat dalam pengembangan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi yang lebih adil dan inklusif di Pakistan. (*Integration of Economics and Religion in the View of Syed...*, n.d.) Selain itu, Naqvi juga berperan sebagai penasihat senior ekonomi di National Electric Power Regulatory Authority (NEPRA), serta menjabat sebagai Profesor Nasional Terhormat yang didukung oleh Higher Education Commission of Pakistan. Ia juga menjabat sebagai Direktur Jenderal di Federal Urdu University, Islamabad, di mana ia berkontribusi pada pengembangan pendidikan tinggi di Pakistan.

Selama kariernya yang panjang, Naqvi memperoleh berbagai penghargaan yang mengakui kontribusi luar biasanya di bidang ekonomi. Pada tahun 1991, ia dianugerahi *Sitara-i-Imtiaz* (Bintang Keunggulan) oleh Presiden Pakistan, sebuah penghargaan prestisius yang mengakui kontribusinya dalam bidang ilmu ekonomi. Tahun berikutnya, ia menerima *ECO Award* atas kinerjanya yang luar biasa di bidang ekonomi. Pengakuan lainnya datang pada tahun 2009 ketika ia menerima *Lifetime Academic Achievement Award*, sebuah penghargaan yang mengakui kontribusinya yang abadi dalam pendidikan ekonomi dan pengembangan kebijakan. (Naqvi, Syed Nawab, 2024)

Karya tulis Naqvi, baik berupa buku maupun makalah ilmiah, memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori ekonomi, terutama di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam. Beberapa karya utamanya antara lain:

- *Perspectives on Morality and Human Well-being* (2003), yang membahas etika dalam ekonomi Islam dan dampaknya pada kesejahteraan manusia.
- *Development Economics: Nature and Significance* (2002), yang mengeksplorasi paradigma baru dalam teori ekonomi pembangunan.
- *The Crisis of Development Planning in Pakistan: Which Way Now?* (2000), yang menyoroti krisis dalam perencanaan pembangunan di Pakistan.
- *External Shocks and Domestic Adjustment: Pakistan's Case 1970-1990* (1997), yang mengkaji dampak guncangan eksternal terhadap penyesuaian ekonomi domestik di Pakistan.
- *Islam, Economics, and Society* (1994), di mana Naqvi menguraikan perspektif ekonomi Islam dalam konteks sosial-ekonomi modern.
- *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (1981), yang merupakan kontribusi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam analisis ekonomi modern.

Selain itu, ia juga menulis banyak laporan dan analisis kebijakan yang berfokus pada ekonomi Pakistan, termasuk *Macro-Economic Framework for the Eighth Five Year Plan* (1992) dan *Structural Change in Pakistan's Agriculture* (1989). Karya-karya ini tidak hanya memberikan pandangan yang mendalam tentang ekonomi Islam dan pembangunan, tetapi juga menjadi acuan penting bagi kebijakan ekonomi di Pakistan.

### **Konsep Pertumbuhan Inklusif Prespektif Nawab Haider Naqvi**

Pertumbuhan ekonomi inklusif atau *inclusive growth* merupakan salah satu konsep yang semakin mendapatkan perhatian dalam wacana pembangunan global, terutama di negara-negara berkembang. Konsep ini bukan hanya berfokus pada laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana hasil dari pertumbuhan tersebut didistribusikan secara merata untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan karya Syed Nawab Haider Naqvi dalam tulisannya *The Idea of Inclusive Growth and Development Policy*, pertumbuhan inklusif dipandang sebagai pendekatan holistik yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. (Naqvi, 2012, p. 1)

### **Definisi dan Prinsip Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Prespektif Nawab Haider Naqvi**

Pertumbuhan inklusif, seperti yang dijelaskan oleh Syed Nawab Haider Naqvi, adalah konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan percepatan pertumbuhan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut didistribusikan secara merata untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menurunkan

tingkat kemiskinan. Konsep ini mendasari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan pemerataan hasil akan menciptakan ketimpangan yang lebih besar dan memperburuk kondisi kemiskinan di masyarakat. Naqvi menekankan pentingnya mengintegrasikan tiga aspek utama dalam kebijakan pertumbuhan inklusif, yakni: (Umar, 2022, p. 228)

1. **Peningkatan Pendapatan Per Kapita:** Pertumbuhan ekonomi harus dapat mendorong kenaikan pendapatan per kapita secara berkelanjutan, yang mencerminkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
2. **Pengurangan Ketimpangan Ekonomi:** Distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi harus merata, tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menghindari polarisasi sosial yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketimpangan ekonomi yang dibiarkan terjadi dalam suatu masyarakat dapat memicu ketidakstabilan sosial, memperlemah daya saing tenaga kerja, dan menghambat mobilitas sosial.
3. **Penurunan Tingkat Kemiskinan:** Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama dari pertumbuhan inklusif. Kemiskinan yang meluas akan membatasi daya beli masyarakat, menghambat produktivitas, dan pada akhirnya membatasi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Naqvi mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak mengurangi kemiskinan bukanlah pertumbuhan yang berkelanjutan atau bermakna.

Konsep ini diusulkan sebagai solusi terhadap permasalahan yang sering dihadapi dalam kebijakan ekonomi tradisional, di mana pertumbuhan ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit, sementara mayoritas populasi tetap terjebak dalam kemiskinan. Menurut Naqvi, tanpa upaya untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan, pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai.

### **Kritik terhadap Pertumbuhan Berbasis PDB**

Naqvi mengkritik pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, meskipun PDB dapat mengukur besaran output ekonomi suatu negara, PDB gagal mencerminkan distribusi kekayaan, kualitas hidup, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Jika kebijakan pembangunan hanya bertujuan meningkatkan PDB tanpa memperhatikan bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan, maka kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah akan tetap terjebak dalam kemiskinan, meskipun secara statistik, perekonomian terlihat tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi dengan pemerataan justru dapat memperlebar ketimpangan ekonomi dan memperburuk kondisi sosial. (Naqvi, 1995, p. 543)

Naqvi juga menyoroti implikasi negatif dari ketimpangan yang dihasilkan oleh pertumbuhan berbasis PDB. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil elit ekonomi, sementara mayoritas populasi tidak merasakan dampaknya, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Fenomena ini menghasilkan ilusi bahwa pendapatan per kapita meningkat, padahal kenyataannya, ketidakadilan ekonomi semakin parah. Ketimpangan yang tinggi ini memiliki dampak buruk tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik. Ketidakpuasan sosial yang timbul dari ketidakadilan ekonomi berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan konflik, yang pada akhirnya merusak kohesi sosial dalam masyarakat.

Sebagai contoh keberhasilan, Naqvi menyebut negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Cina yang menerapkan kebijakan pertumbuhan inklusif melalui intervensi pemerintah yang efektif. Negara-negara ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi pendapatan yang lebih adil, yang diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan tersebut. (Wong & Lee, 2018, p. 590) Sebaliknya, negara-negara seperti Filipina dan Meksiko yang gagal menerapkan kebijakan pertumbuhan inklusif justru mengalami stagnasi ekonomi dan ketimpangan yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan PDB, tetapi pada komitmen terhadap distribusi yang adil. (Naqvi, 2012, p. 2)

Kritik Naqvi terhadap pertumbuhan berbasis PDB menekankan bahwa pembangunan yang berfokus semata pada peningkatan angka PDB tanpa memperhatikan pemerataan dan pengentasan kemiskinan bukanlah bentuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari besarnya output ekonomi, tetapi dari sejauh mana manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang efektif harus mempertimbangkan distribusi ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai elemen integral dari pertumbuhan yang berkelanjutan.

### **Peran Pemerintah dalam Pertumbuhan Inklusif**

Naqvi menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan. Dalam pandangannya, mekanisme pasar, meskipun penting, tidak akan secara otomatis menghasilkan distribusi kekayaan yang adil atau mengurangi kemiskinan. Pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Naqvi, 1994, p. 9) Pertumbuhan ekonomi yang hanya mengandalkan pasar cenderung memusatkan keuntungan pada kelompok kaya, sehingga

memperbesar ketimpangan. Untuk menghindari hal tersebut, intervensi pemerintah diperlukan dalam beberapa area kunci yang akan memastikan pertumbuhan inklusif.

Salah satu intervensi utama yang disoroti Naqvi adalah peningkatan tabungan domestik dan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan tingkat investasi yang memadai, baik dalam infrastruktur maupun pengembangan sektor-sektor produktif lainnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan tabungan domestik, yang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan.(Naqvi, 2012, p. 9) Kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif bagi peningkatan tabungan dan investasi dalam negeri, akan menjadi kunci bagi keberhasilan strategi ini. Selain itu, investasi dalam infrastruktur yang efektif juga akan menciptakan lapangan kerja, yang berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Petrović et al., 2021, p. 580)

Selain itu, Naqvi menyoroti pentingnya kebijakan industrialisasi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan inklusif. Kebijakan substitusi impor, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada barang impor dan memperkuat industri domestik, merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.(Naqvi, 2012, p. 1) Industrialisasi memegang peranan penting dalam transisi dari ekonomi agraris ke ekonomi modern yang lebih produktif, yang mampu menyediakan pekerjaan bernilai tinggi. Kebijakan substitusi impor tidak hanya mendukung pertumbuhan sektor industri, tetapi juga membantu mengembangkan kapasitas produksi domestik yang lebih kompetitif di pasar global. Pemerintah dapat memainkan peran utama dalam mendukung industrialisasi dengan memberikan insentif kepada industri dalam negeri, melindungi industri baru dari persaingan internasional yang tidak adil, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi.(Muslimin & Darwanto, 2021, p. 147)

Selanjutnya, Naqvi mengusulkan perlunya kontrak sosial baru sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan dinamis dalam konteks pertumbuhan inklusif. Kontrak sosial ini mengacu pada kesepakatan yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah berkomitmen untuk mengelola sumber daya ekonomi dengan cara yang mempromosikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kontrak ini harus mencakup kebijakan redistribusi pendapatan, yang memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir elit, tetapi didistribusikan lebih merata ke seluruh masyarakat. Redistribusi dapat diwujudkan melalui sistem perpajakan yang progresif, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah harus memastikan bahwa akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak, tersedia secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang paling rentan.(Naqvi, 2012, p. 1)

Naqvi juga mencatat bahwa pertumbuhan inklusif memerlukan sinergi antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam menciptakan kerangka kerja institusional yang memungkinkan partisipasi luas dari seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Ini termasuk penguatan kapasitas demokrasi dan desentralisasi kekuasaan, yang memungkinkan keputusan-keputusan politik dan ekonomi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Naqvi berargumen bahwa tanpa adanya partisipasi politik yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang pesat sekalipun tidak akan mampu menghasilkan keadilan sosial yang diharapkan. (Tayyab, 2024, p. 117)

Dalam implementasi kebijakan, pemerintah harus bergerak melampaui sekadar mengatur pasar dan memainkan peran aktif dalam membangun pilar-pilar ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini mencakup tidak hanya investasi dalam infrastruktur fisik, tetapi juga dalam modal manusia, melalui peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan kompetitif secara global. Dengan demikian, peran pemerintah dalam pertumbuhan inklusif bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator utama yang memimpin transformasi ekonomi dan sosial.

### **Relevansi Konsep Pertumbuhan Inklusif Prespektif Nawab Haider Naqvi untuk Pembangunan Ekonomi Kontemporer di Negara Muslim**

Konsep pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh Syed Nawab Haider Naqvi memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim yang menghadapi tantangan struktural, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang meluas, dan marginalisasi sosial terhadap kelompok tertentu. Gagasan Naqvi menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau peningkatan pendapatan per kapita, melainkan juga harus mencakup dimensi sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini sangat penting di tengah kenyataan bahwa meskipun beberapa negara Muslim mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, banyak dari mereka tetap menghadapi masalah ketimpangan yang meningkat, serta kesenjangan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Di Indonesia, salah satu negara Muslim terbesar, ketimpangan distribusi pendapatan menjadi isu sentral dalam pembangunan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Arsani (2018) menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup pesat, ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan. Indeks Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan meningkat dari 0,363 pada tahun 2005 menjadi 0,394 pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok elit ekonomi, sementara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap terpinggirkan. (Sitorus & Arsani, 2018, p. 64)

Relevansi pemikiran Naqvi sangat terlihat di sini. Naqvi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan distribusi kekayaan yang adil hanya akan memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Naqvi mendorong perlunya kebijakan ekonomi yang mampu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ke seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok elit. Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan peningkatan produktivitas di sektor informal menjadi langkah penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, kebijakan yang diarahkan pada penguatan sektor informal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting dalam mengurangi ketimpangan dan memperluas akses terhadap kesempatan ekonomi.

Kasus yang serupa juga terjadi di Pakistan, di mana ketimpangan ekonomi telah menjadi isu utama dalam pembangunan nasional. Meskipun negara ini telah mencatat pertumbuhan PDB yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Azra Khan et al. (2016), distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi di Pakistan sangat terbatas pada kelompok-kelompok ekonomi yang lebih mapan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah tetap tertinggal. (Khan et al., 2016, p. 455) Dalam situasi ini, relevansi pemikiran Naqvi sangat nyata. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif berpotensi menciptakan polarisasi sosial yang lebih dalam dan memperburuk ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi ini, Naqvi menyarankan pendekatan pertumbuhan yang lebih berkeadilan, di mana manfaat pertumbuhan didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar bagi kelompok rentan, sehingga mereka dapat terlibat lebih aktif dalam proses ekonomi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur dan teknologi juga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara Muslim. Di Indonesia, ketimpangan infrastruktur telekomunikasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat mencolok. Gati dan Khoirunurrofik (2023) menemukan bahwa kesenjangan infrastruktur telekomunikasi berkontribusi pada peningkatan ketimpangan ekonomi, khususnya di daerah-daerah terpencil yang kurang berkembang. Masyarakat di wilayah-wilayah terpencil tersebut tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi dan infrastruktur dasar, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia di wilayah perkotaan. (Sekar Asmoro Gati & Khoirunurrofik, 2023, p. 1)

Dalam konteks ini, Naqvi menggarisbawahi pentingnya akses yang merata terhadap infrastruktur dasar dan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia menekankan bahwa tanpa akses yang setara terhadap sumber daya tersebut, ketimpangan akan semakin melebar, dan pertumbuhan ekonomi akan lebih banyak dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Naqvi menekankan peran pemerintah dalam memperluas infrastruktur di daerah tertinggal guna memastikan bahwa seluruh

masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Naqvi berpendapat bahwa kebijakan yang memfasilitasi akses yang setara terhadap teknologi dan infrastruktur tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga akan memperkecil kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan yang tinggi juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Di Indonesia, meskipun ada program-program pengentasan kemiskinan, distribusi hasil dari pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Pukuh dan Widyasthika (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antara 2014 dan 2016 tidak secara merata mendistribusikan manfaat kepada kelompok masyarakat miskin, yang tetap tertinggal. (Pukuh & Widyasthika, 2017, p. 195) Naqvi, dalam hal ini, menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus menjadi tujuan utama dari kebijakan pertumbuhan inklusif.

Menurutnya, redistribusi kekayaan melalui kebijakan fiskal yang progresif dan peningkatan akses bagi kelompok masyarakat rentan terhadap layanan keuangan mikro dan pendidikan berkualitas adalah solusi penting untuk mengurangi kemiskinan. Pemikiran Naqvi relevan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Muslim lain seperti Bangladesh, di mana ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi hambatan utama bagi pembangunan. Kebijakan yang diarahkan pada redistribusi kekayaan, terutama melalui program-program perlindungan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin, dapat membantu negara-negara seperti Bangladesh untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. (Nahar & Siriwardana, 2013, p. 145)

Lebih lanjut, keterbatasan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan inklusif juga menjadi hambatan yang dihadapi banyak negara Muslim. Di Pakistan, misalnya, meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, investasi dalam infrastruktur dan pendidikan masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Rini dan Tambunan (2021) menunjukkan bahwa situasi serupa terjadi di Indonesia, di mana wilayah-wilayah terpencil tidak mendapatkan manfaat yang setara dari pertumbuhan ekonomi karena kurangnya investasi yang memadai. (Rini & Hamonangan Tambunan, 2021, p. 85) Naqvi menekankan bahwa mekanisme pasar saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan yang inklusif.

Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kebijakan redistributif dan investasi yang fokus pada peningkatan akses ke pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya mereka yang tinggal di kawasan perkotaan atau yang lebih kaya. Secara keseluruhan, pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi tentang pertumbuhan

inklusif memiliki relevansi yang sangat kuat di berbagai negara Muslim yang menghadapi tantangan ketimpangan pendapatan, akses infrastruktur yang terbatas, dan kemiskinan.

Negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh dapat mengadopsi prinsip-prinsip pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh Naqvi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Naqvi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan redistribusi kekayaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar hanya akan memperburuk ketimpangan dan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan mengadopsi pendekatan pertumbuhan inklusif, negara-negara Muslim dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, di mana manfaat pembangunan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok elit tertentu.

## **KESIMPULAN**

Konsep pertumbuhan inklusif yang dikemukakan oleh Syed Nawab Haider Naqvi memberikan kerangka teoritis yang sangat relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim. Pertumbuhan ekonomi, menurut Naqvi, tidak hanya harus berfokus pada peningkatan PDB, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang merata untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Naqvi mengkritik pendekatan berbasis PDB yang sering kali gagal mencerminkan pemerataan manfaat ekonomi. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan yang tidak disertai dengan distribusi kekayaan hanya memperdalam ketimpangan sosial dan dapat memicu ketidakstabilan sosial serta politik. Naqvi menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam pertumbuhan inklusif: peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan, dan penurunan kemiskinan. Dalam konteks negara-negara Muslim, seperti Indonesia dan Pakistan, relevansi konsep ini sangat jelas. Meskipun kedua negara mengalami pertumbuhan ekonomi, manfaatnya seringkali terkonsentrasi pada kelompok elit, sementara kelompok masyarakat miskin tetap terpinggirkan. Peran pemerintah juga menjadi fokus dalam pemikiran Naqvi. Ia berargumen bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan redistributif yang mendukung investasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Naqvi juga menyoroti pentingnya industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan inklusif, dengan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmed, M. M. (2021). *Inequality of Opportunity in Education and Sustainable Development: The Case of Bangladesh* (SSRN Scholarly Paper 3900226). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3900226>

Arkorful, V. E., Basiru, I., Anokye, R., Latif, A., Agyei, E. K., Hammond, A., Pokuaah, S., Arkorful, E. V., & Abdul-Rahaman, S. (2020). Equitable Access and Inclusiveness in Basic Education: Roadblocks to Sustainable Development Goals. *International Journal of*

- Awe, O. O., Mudida, R., & Gil-Alana, L. A. (2021). Comparative analysis of economic growth in Nigeria and Kenya: A fractional integration approach. *International Journal of Finance & Economics*, 26(1), 1197–1205. <https://doi.org/10.1002/ijfe.1845>
- Bhorat, H., Naidoo, K., & Pillay, K. (Eds.). (2016). *Growth, Poverty and Inequality Interactions in Africa: An Overview of Key Issues*. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.267778>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Epo, B. N., Baye, F. M., Mwabu, G., Etyang, M. N., & Gachanja, P. M. (2023). The Nexus between Poverty, Inequality and Growth: A Case Study of Cameroon and Kenya. *Journal of African Economies*, 32(Supplement\_2), ii113–ii146. <https://doi.org/10.1093/jae/ejac045>
- Integration of Economics and Religion in the View of Syed...* (n.d.). Iaei-Website. Retrieved October 17, 2024, from <https://iaei.or.id/>
- Khan, A., Khan, G., Safdar, S., Munir, S., & Andleeb, Z. (2016). Measurement and Determinants of Inclusive Growth: A Case Study of Pakistan (1990-2012). *The Pakistan Development Review*, 455–466. <https://doi.org/10.30541/v55i4I-IIpp.455-466>
- Lestari, Y. A. P., & Damanuri, A. (2022). Analysis of Syed Nawab Haider Naqvi's Islamic Ethics System on Leveling Option of Expeditionary Services on Shopee Marketplace. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1614>
- Mohseni Cheraghlou, A. (2020). Promoting Sdgs and Shared Prosperity: The Potential Role of Islamic Economics and Finance. In M. Saraç & M. Hassan, *Islamic Perspective for Sustainable Financial System* (pp. 93–114). Istanbul University Press. <https://doi.org/10.26650/B/SS10.2020.017.05>
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.
- Muslimin, M. I., & Darwanto, D. (2021). Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.540>
- Nahar, B., & Siriwardana, M. (2013). Trade Opening, Fiscal Reforms, Poverty, and Inequality: A CGE Analysis for Bangladesh. *The Developing Economies*, 51(2), 145–185. <https://doi.org/10.1111/deve.12009>

- Naqvi, S. N. H. (1994). New Bottles for Old Wine: The Case of Development Economics. *South Asian Survey*, 1(1), 9–29. <https://doi.org/10.1177/097152319400100102>
- Naqvi, S. N. H. (1995). The nature of economic development. *World Development*, 23(4), 543–556. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00001-S](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00001-S)
- Naqvi, S. N. H. (2012). The Idea of Inclusive Growth and Development Policy. *The Pakistan Development Review*, 51(1), 1–21.
- Naqvi, Syed Nawab. (2024, August 28). SAGE India. <https://in.sagepub.com/en-in/sas/author/syed-nawab-h-naqvi>
- Petrović, P., Arsić, M., & Nojković, A. (2021). Increasing public investment can be an effective policy in bad times: Evidence from emerging EU economies. *Economic Modelling*, 94, 580–597. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.004>
- Pukuh, N., & Widyasthika, H. F. (2017). When Growth is Inclusive in Indonesia? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.19>
- Rini, D. L., & Hamonangan Tambunan, T. T. (2021). Inclusive Economic Growth of Indonesia and Its Determinants-Recent Evidence with Provincial Data. *Asian Journal of Interdisciplinary Research*, 85–100. <https://doi.org/10.34256/ajir2118>
- Sekar Asmoro Gati & Khoirunurrofik. (2023). THE EFFECT OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE ON INCLUSIVE ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA 2011–2021. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 2(38). [https://doi.org/10.31435/rsglobal\\_ijitss/30062023/8007](https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062023/8007)
- Sitorus, A. V. Y., & Arsani, A. M. (2018). A Comparative Study of Inter-Provincial Inclusive Economic Growth in Indonesia 2010-2015 with Approach Methods of ADB, WEF, and UNDP. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.36574/jpp.v2i1.32>
- Sulaeman, S., & Sukmana, R. (2023). Economic Growth, Income Inequality, Government Integrity, and Spending towards SDG 1 on Poverty Eradication: An Empirical Study from Twenty Muslim-Majority Countries. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1), 27–47. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.157>
- Tagliapietra, S. (2019). The impact of the global energy transition on MENA oil and gas producers. *Energy Strategy Reviews*, 26, 100397. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100397>

- Tayyab, M. I. D. M. S. (2024). ASSESSING THE INTERFACE LINKING THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM (IES) WITH THE GLOBAL ECONOMIC PARADIGM. *Jahan-e-Tahqeeq*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.61866/jt.v7i3.1692>
- Umar, A. U. A. A. (2022). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 226–231.
- Vaghefi, N., Siwar, C., & Aziz, S. A. A. G. (2015). Green Economy: Issues, Approach and Challenges in Muslim Countries. *Theoretical Economics Letters*, 05(01), 28–35. <https://doi.org/10.4236/tel.2015.51006>
- Woertz, E. (2021). The Energy Politics of the Middle East and North Africa (MENA). In K. J. Hancock & J. E. Allison (Eds.), *The Oxford Handbook of Energy Politics* (pp. 687–710). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190861360.013.35>
- Wong, C.-Y., & Lee, K. (2018). Projecting the Arena of Inclusion: The Case of South Korea in Pursuing a Phased Inclusive Growth Process. *Review of Policy Research*, 35(4), 590–616. <https://doi.org/10.1111/ropr.12286>
- Yusuf, A. (2014). PARADIGMA KONTEMPORER EKONOMI ISLAM (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol11.Iss2.355>